

## FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

I MADE HARY KUSMAWAN<sup>1)</sup>, SUHARWAN HAMZAH<sup>2)</sup>, I GEDE ANGGA PERMANA<sup>3)</sup>

Ps. Ekonomi pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tabanan

*harykusmawan@gmail.com (corresponding)*

### ABSTRAK

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998 banyak bermunculan terobosan-terobosan baru dalam memajukan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan desentralisasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah ini diharapkan kemandirian keuangan daerah dapat terwujud. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F. Hasil penelitian yang di dapat  $t_{hitung} (2,209) > t_{tabel} (1,782)$  dan tingkat signifikan sebesar 0,047 lebih besar dari 0,05. Maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak,. Ini yang berarti pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal. Oleh karena  $t_{hitung} (4,814) > t_{tabel} (1,782)$ , Maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan tingkat signifikansi 0,000. Ini berarti bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal dan  $t_{hitung} (5,380) > t_{tabel} (1,782)$ , Maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan tingkat signifikansi 0,000. Ini berarti bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif secara parsial terhadap belanja modal bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Oleh karena  $F_{hitung} (47,051) > F_{tabel} (3,49)$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan tingkat signifikansi 0,000. Ini berarti pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara signifikan berpengaruh simultan terhadap belanja modal.

**Kata kunci :** pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal

### ABSTRACT

Since the reform in 1998, many new breakthroughs have emerged in advancing governance in Indonesia. The decentralization policy, which is hereinafter better known as the regional autonomy policy. With the enactment of this regional autonomy policy, it is hoped that regional financial independence can be realized. In this study the data analysis technique used was the classical assumption test, multiple linear regression, t test, F test. The results obtained were  $t_{count} (2.209) > t_{table} (1.782)$  and a significant level of 0.047 was greater than 0.05. Then  $H_1$  is accepted and  $H_0$  is rejected. This means that Regional Original Income partially has a positive and significant effect on Capital Expenditures. Because  $t_{count} (4.814) > t_{table} (1.782)$ , then  $H_1$  is accepted and  $H_0$  is rejected with a significance level of 0.000. This means that the General Allocation Fund partially has a positive and significant effect on Capital Expenditures and  $t_{count} (5.380) > t_{table} (1.782)$ , then  $H_1$  is accepted and  $H_0$  is rejected with a significance level of 0.000. This means that the Special Allocation Fund partially has a positive and significant effect on Capital Expenditure that Local Own Revenue, General Allocation Funds and Special Allocation Funds have an influence on capital expenditure. Because  $F_{count} (47.051) > F_{table} (3.49)$ , then  $H_0$  is rejected and  $H_1$  is accepted with a significance level of 0.000. This means that regional original income, general allocation funds and special allocation funds have a significant effect simultaneously on capital expenditure.

**Keywords:** local revenue, general allocation fund, special allocation fund and capital expenditure

### PENDAHULUAN

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998 banyak bermunculan terobosan-terobosan baru dalam memajukan pemerintahan di Indonesia. Termasuk yang berkaitan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal itu dimulai dengan diberlakukannya otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan desentralisasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah ini merupakan kebijakan yang sangat membantu pemerintah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah di Indonesia. Adapun tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien serta responsif terhadap kebutuhan dan potensi yang dimiliki sesuai dengan karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini juga harus disertai dengan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan di daerah agar tidak menyimpang dari kebijakan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah ini diharapkan kemandirian keuangan daerah dapat terwujud, karena tentunya pemerintah pusat juga menyadari bahwa yang paling mengetahui permasalahan di daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan daerah yang ada sampai kepada sumber-sumber pendapatan yang dapat digali oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD akan berpengaruh besar dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Selain PAD, komponen pendapatan daerah berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1, menyatakan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang, selain itu juga menerangkan PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang di dalamnya berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam kegiatan pelaksanaan program-program kerja pemerintah daerah yang sudah dianggarkan sebelumnya dalam APBD. Dalam penganggaran belanja daerah sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat terutama dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik karena dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat tersebut maka akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebab apabila kepercayaan masyarakat meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber PAD. Untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik tersebut maka pemerintah daerah harus lebih memprioritaskan alokasi belanja modal. Karena apabila fasilitas pelayanan publik dapat terpenuhi dengan baik, maka hal tersebut juga dapat meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya juga akan menumbuhkan investasi di daerah. Untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik ini, maka pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bentuk belanja modal dalam APBD (Halim,2007).

Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam era otonomi daerah ini mulai memacu diri untuk menggali potensi-potensi dalam bidang ekonomi dan pendapatan daerah yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD guna membiayai pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Hal tersebut juga tidak lepas dari peran serta pemerintah pusat di dalam ikut membantu mandanai program kerja pemerintah daerah. Seperti diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan PAD yang masih kecil belum mampu mengoptimalkan rencana pembangunan daerah yang begitu besar sehingga peran serta pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan. Karena pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah pembangunan yang mencakup di segala bidang kehidupan, yaitu pembangunan yang dapat menyentuh kepentingan masyarakat banyak, baik berupa pembangunan fisik non fisik, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik kepada masyarakat seperti meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, perbaikan jalan dan yang lainnya, guna meningkatkan taraf hidup, meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat di daerah Kabupaten Tabanan, sehingga jika Pemerintah Kabupaten Tabanan ingin meningkatkan fasilitas pelayanan publik ini maka alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan fasilitas pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan belanja modal (Halim,2007).

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Mardiasmo dalam Fhini (2009), yang menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk peningkatan fasilitas pelayanan publik. Oleh karena itu alokasi belanja modal memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2006-2021?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2006 s.d 2021?

3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2006 s.d 2021?
4. Apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2006 s.d 2021?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2006 s.d 2021.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2006 s.d 2021.
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap secara parsial belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2006 s.d 2021.
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2006 s.d 2021.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tabanan. Pengambilan datanya diperoleh di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tabanan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.

### Identifikasi variabel

Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) dan Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ )
2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tabanan.

### Teknik analisis data

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel *dependen* (kriterium), bila dua atau lebih variabel *independen* sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Belanja modal
- a = Konstanta
- $b_1$  = Koefisien regresi dari  $X_1$
- $b_2$  = Koefisien regresi dari  $X_2$
- $b_3$  = Koefisien regresi dari  $X_3$
- $X_1$  = Pendapatan Asli Daerah
- $X_2$  = Dana Alokasi Umum
- $X_3$  = Dana Khusus
- e = Error

#### Uji signifikasi parameter individual (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

#### Uji signifikasi simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F table. Jika F hitung lebih besar dari nilai F table, maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel *independent* secara bersama-sama mempengaruhi variabel *dependen*.

## Analisis determinasi

Koefisien determinasi merupakan besaran untuk menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk persen (menunjukkan seberapa besar persentase keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman X) atau dengan kata lain seberapa besar X dapat memberikan kontribusi terhadap Y. Maka perlu dicari koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ), dana alokasi umum ( $X_2$ ) dan dana alokasi khusus ( $X_3$ ) terhadap belanja modal (Y).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil yang diperoleh dimasukkan ke persamaan regresi berganda, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda, yaitu:

$$Y = 63598352833,374 + 0,399X_1 + 0,352X_2 + 0,628X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi yang telah dirumuskan seperti tabel 1 sebelumnya, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 63598352833,374 memiliki arti bahwa rata – rata tingkat belanja modal di Kabupaten Tabanan sebesar 63.598.352.833,374 rupiah per tahun bila pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) = 0 atau konstan, dana alokasi umum ( $X_2$ ) = 0 atau konstan dan dana alokasi khusus ( $X_3$ ) = 0 atau konstan.
2. Nilai koefisien  $\beta_1$  sebesar 0,399 memiliki arti bahwa apabila pendapatan asli daerah meningkat sebesar 1 (satu) juta rupiah, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,399 juta rupiah dengan asumsi variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dianggap konstan.
3. Nilai koefisien  $\beta_2$  sebesar 0,352 memiliki arti bahwa jika dana alokasi umum meningkat sebesar 1 (satu) juta rupiah, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,352 juta rupiah dengan asumsi variabel pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi khusus dianggap konstan.
4. Nilai koefisien  $\beta_3$  sebesar 0,628 memiliki arti bahwa jika dana alokasi khusus meningkat sebesar 1 (satu) juta rupiah, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,628 juta pertahun dengan asumsi variabel pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum dianggap konstan.

### Uji t (Uji Parsial)

Uji regresi parsial (t-test) dilakukan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat dapat dilihat pada table 4.8 diatas.

1. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,209 dan nilai t tabel sebesar 1,782. Oleh karena t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,209 > 1,782$ ) dan tingkat signifikan sebesar 0,047 lebih besar dari 0,05. Maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, dapat dilihat pada Gambar 4.4 nilai t hitung berada pada daerah penerimaan  $H_0$  yang berarti pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y) di Pemerintah Kabupaten Tabanan.
2. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 4,814 dan nilai t tabel sebesar 1,782. Oleh karena t hitung lebih besar dari t tabel ( $4,814 > 1,782$ ) dan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih Kecil dari 0,05. Maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, dapat dilihat pada Gambar 4.5 nilai t hitung berada pada daerah penerimaan  $H_0$  yang berarti dana alokasi umum ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y) di Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 5,380 dan nilai t tabel sebesar 1,782. Oleh karena t hitung lebih besar dari t tabel ( $5,380 > 1,782$ ) dan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih Kecil dari 0,05. Maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, dapat dilihat pada Gambar 4.5 nilai t hitung berada pada daerah penerimaan  $H_0$  yang berarti dana alokasi khusus ( $X_3$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y) di Pemerintah Kabupaten Tabanan.

### Uji F (uji simultan)

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 47,051 dan nilai F tabel sebesar 3,49. Oleh karena F hitung lebih besar dari F tabel ( $47,051 > 3,49$ ) dan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima, yang berarti pendapatan asli daerah ( $X_1$ ), dana alokasi umum ( $X_2$ ) dan dana alokasi khusus ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y) di Pemerintah Kabupaten Tabanan.

## PENUTUP

### Simpulan

Dari hasil analisis pada pembahasan, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tabanan.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tabanan
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tabanan. Analisis determinasi menunjukkan nilai koefisien (R) sebesar 0,960 atau 96,0% yang berarti hubungan kuat (relation) antara pengalokasian anggaran belanja modal dengan variabel independennya yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah sangat erat.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran antara lain sebagai berikut :

1. Penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tabanan yang selama ini lebih banyak tersedot penggunaannya untuk belanja pegawai dan keperluan belanja daerah lainnya disarankan Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu mengoptimalkan lebih besar untuk belanja modal sehingga mampu memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut juga akan meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Tabanan.
2. Dalam pengalokasian dana alokasi umum yang relatif meningkat setiap tahunnya disarankan pemerintah kabupaten tabanan lebih mengoptimalkan peningkatkan sarana insfrastruktur di daerah sehingga nantinya juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tabanan.
3. Dalam pengalokasian dana alokasi khusus yan cenderung meningkat setiap tahunnya disarankan pemerintah kabupaten tabanan memanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan bidang pelayanan meliputi peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga nantinya juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabanan.
4. Dalam pengalokasian belanja modal, Pemerintah Kabupaten Tabanan disarankan memperhatikan pengalokasian untuk belanja pemeliharannya sehingga barang yang dibeli melalui anggaran belanja modal dapat terpelihara dengan baik dan penggunaannya terus dapat dimaksimalkan
5. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan jumlah penerimaan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah yang relatif meningkat setiap tahunnya agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui peningkatan belanja modal terutama dalam meningkatkan sarana pasilitas publik sehingga nantinya juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tabanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto & Yulia Yustika Sari. (2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X.
- Fhini. (2009). *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*. Salatiga : Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Halim, Abdul. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Lubis, Indra Syahputra. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. Medan : Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Miharbi, Liyoni Arista. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Gorontalo : Jurnal.
- Nordiawan, Deddi. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

- Pelealu, Andreas Marzel. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kota Manado tahun 2003-2012*. Jurnal EMBA. Vol.1 No. 4: 1189-1197.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*.
- R. Soedarga. (2007). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung : NV. Eresco
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah*
- Yani, Ahmad. (2005). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerrah di Indonesia*. Rajawali Pers..